

**TEORI KEKUASAAN: KOMPARASI PEMIKIRAN
HANNAH ARENDT (1906-1975) DAN IBNU KHALDUN
(1332-1406)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S. Fil. I.)

Oleh:

Irsal Mas'udi

NIM. 11510011

**PROGRAM STUDI FILSAFAT AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Irsal Mas'udi

NIM : 11510011

Program Studi : Filsafat Agama

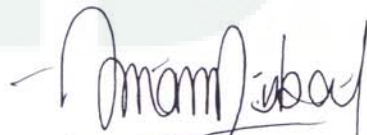
Tahun Akademik : 2015/2016

Judul Skripsi : *TEORI KEKUASAAN: KOMPARASI PEMIKIRAN HANNAH ARENDT DAN IBNU KHALDUN*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Filsafat Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2016



Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.i.
NIP. 19780629 200801 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsal Mas'udi

NIM : 11510011

Program Studi : Filsafat Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : TEORI KEKUASAAN: KOMPARASI PEMIKIRAN HANNAH
ARENDT (1906-1975) DAN IBNU KHALDUN (1332-1406)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwaskrripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan **TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DI PERGURUAN TINGGI LAIN**serta bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi serta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak membatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2016



Irsal Mas'udi
NIM. 11510011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1350/Un.02/DU.U/PP.05.3/06/2016

Tugas Akhir dengan judul : TEORI KEKUASAAN: KOMPARASI PEMIKIRAN HANNAH
ARENDT (1906-1975) DAN IBNU KHALDUN (1332-1406)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRSAL MAS'UDI

Nomor Induk Mahasiswa : 11510011

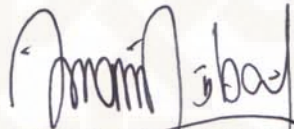
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Juni 2016

Nilai ujian Tugas Akhir : A- (92)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



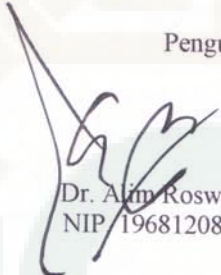
Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I.
NIP. 19780629 200801 1 003

Penguji II




Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750816 200003 1 001

Penguji III



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

Yogyakarta, 02 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang Maha Agung, Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang senantiasa menganugerahkan kepada hamba-Nya segala kenikmatan dan kesempatan. Kenikmatan dalam ber-Islam dan kesempatan dalam menuntut ilmu-Nya yang di pancarkan di muka bumi ini. Alhamdulillah atas izin dan hidayahnya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: TEORI KEKUASAAN: KOMPARASI PEMIKIRAN HANNAH ARENDT DAN IBNU KHALDUN.

Penyusunan skripsi ini penulis tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Filsafat Agama (S.Fil.I.) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua Bapak dan Ibu penulis, melalui mereka berdua penulis bisa mengenyam pendidikan tinggi
2. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Alim Roswanto M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang senantiasa mengingatkan penulis terkait akademik.
4. Prof. H. Iskandar Zulkarnain selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa bijaksana membimbing penulis selama menjadi anak didik

5. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. selaku pembimbing skripsi penulis yang senantiasa bersabar menghadapi ketidaktahuan penulis, senantiasa membimbing, memberikan arahan dan motivasi dalam bidang keilmuan yang belum penulis pahami secara mendalam
6. Dr. H. Robby Abror, S.Ag., M.Hum dan Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Filsafat Agama yang senantiasa memberikan pertimbangan atas tema penulis
7. Seluruh dosen Program studi Filsafat Agama tanpa terkecuali
8. Teman-teman LPM Arena, Lembaga Studi Filsafat (LSFil), kawan-kawan AFA yang telah banyak mengisi otak penulis dan tidak lupa kepada seluruh kawan-kawan FPPI, KMPD yang memberikan pendidikan politik serta seluruh teman-teman Filsafat Agama angkatan 2011

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini.

Demikian pengantar dari penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 26 Mei 2016



Irsal Mas'udi

ABSTRAK

Dalam diskursus dan kajian filsafat politik kita dapat temukan banyak fenomena yang berkaitan dengan masyarakat dan solidaritas. Terlebih lagi diskursus filsafat politik yang membahas tentang kekuasaan negara yang berkaitan dengan masyarakat dan solidaritas, termasuk peran masyarakat dan solidaritas di dalam pembentukan kekuasaan negara. Bukan hanya dalam ranah struktural negara, masyarakat dan solidaritas juga mempunyai peran penting di luar institusi Negara yaitu sebagai pengontrol pemerintah dan pondasi kekuasaan negara itu sendiri, dalam hal ini, demi tetap mempertahankan kekuasaan dan menjaga atau melindungi masyarakat, kekuasaan negara yang pada akhirnya harus memiliki ikatan solidaritas yang kuat.

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang besar di dalam sebuah masyarakat. Negara mempunyai tugas untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman dan membawa masyarakat kepada keharmonisan. Kekuasaan yang dimiliki negara diperoleh dari kuatnya rasa solidaritas dan merupakan pelembagaan kepentingan umum. Negara dapat melakukan kontrol terhadap masyarakat untuk melepaskan ruang privat yang bermotif kepentingan pribadi, yang dalam istilah Arendt membawa masyarakat terlepas dari ruang privatnya.

Telah banyak tokoh yang membahas tentang kekuasaan kemudian mengaitkan dengan konsep masyarakat dan solidaritas dalam pembentukan kekuasaan negara. Termasuk dua tokoh yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun, dalam penelitian ini difokuskan pada konsep kekuasaan yang digagas oleh kedua tokoh tersebut. Yang di dalamnya banyak mengurai tentang kekuasaan, masyarakat dan solidaritas itu sendiri.

Penelitian ini mendeskripsikan dan melakukan analisa konseptual terhadap makna kekuasaan negara, konsep masyarakat dan ikatan solidaritas sosial yang di gagas oleh Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun, analisa konseptual tersebut merupakan salah satu bentuk pendakatan dalam studi filsafat politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, interpretasi dan komparasi, metode ini digunakan untuk menganalisis data sekunder dan primer yang sudah diklasifikasikan. Dengan metode ini diharapkan agar dapat memahami tesis-tesis yang dibangun oleh kedua tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu, antara Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan pentingnya kekuasaan dalam tatanan masyarakat, baik kekuasaan merupakan tujuan atau kekuasaan sebagai perangkat untuk mempertahankan eksistensi manusia dan s antara kedua tokoh tersebut melihat masyarakat sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Namun kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan yang mendasar

yaitu pada konsep solidaritas dan konsep masyarakatnya. Pada Hannah Arendt solidaritas sebagai sebuah ikatan tindakan manusia sementara pada Ibnu Khaldun solidaritas terbentuk dari ikatan darah. Namun diantara kedua konsep tersebut kedua tokoh tersebut menganggap bahwa solidaritas social merupakan kunci dari kekuasaan negara. Semakin kuat ikatan solidaritas social semakin kokoh juga kekuasaan negara.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Data Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Analisi Data	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA HANNAH ARENDT DAN IBNU KHALDUN	14

A. Biografi Hannah Arendt	14
B. Karya-karya Hannah Arendt	21
C. Biografi Ibnu Khaldun	24
D. Karya-karya Ibnu Khaldun.....	32
BAB III : Teori Kekuasaan Hannah Arendt Dan Ibnu Khaldun	36
A. Konsep Kekuasaan Hannah Arendt	36
B. Konsep Kekuasaan Ibnu Khaldun	47
BAB IV : Komparasi Konsep Kekuasaan Hannah Arendt Dan Ibnu Khaldun	60
A. Persamaan Konsep Kekuasaan Hannah Arendt Dan Ibnu Khaldun	60
1. Konsep Masyarakat.....	61
2. Konsep Solidaritas	70
B. Perbedaan Konsep Kekuasaan Hannah Arendt Dan Ibnu Khaldun	77
1. Konsep Masyarakat	77
2. Konsep Solidaritas	85
BAB V : PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan pemikiran manusia, para penggagas teoritis politik mengkonsepsikan adanya perubahan dan perbedaan dalam mendefinisikan politik. Konsekuensinya setiap zaman mempunyai corak tertentu, tergantung pada kebutuhan zaman berdasarkan konstruksi kondisi sosial-budaya yang melingkupi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan periodisasi perkembangan sejarah pemikiran politik, yang dimulai dari era Yunani klasik sampai kontemporer.

Adalah Plato dan Aristoteles yang mula-mula secara sistematis berbicara persoalan politik. Kedua tokoh tersebut mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang filsafat politik. Namun kedua tokoh tersebut memiliki cara pandang yang berbeda mengenai politik. Plato misalnya membangun gagasannya dengan sangat menekankan peran “*idea*” dalam pembentukan suatu negara, sedangkan Aristoteles menekankan hal yang bersifat realistis. Perbedaan diantara keduanya bukan hanya terletak pada landasan berpikir mengenai politik, bahkan sampai pada taraf tujuan politik maupun tujuan negara.

Perwujudan “*idea*” dalam bentuk negara merupakan rumusan Plato yang dituangkan dalam bukunya dengan judul *Republic*. Secara sederhana Plato dalam buku *Republicnya* hendak menjelaskan perihal hubungan negara dengan warganya disatu sisi, sementara di sisi lainnya juga ingin mendefinisikan “keadilan”. Maka yang diperlukan adalah mendefinisikan negara terbaik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi logis tentang keadilan.

Bisa jadi negara menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hal lainnya, semisal persoalan agama. Posisi tertinggi ini mengandaikan bahwa tidak ada kepentingan yang perlu didahulukan selain kepentingan negara. Hal ini ditegaskan dengan gamblang oleh Plato bahwa segala sesuatu yang sejalan dengan kepentingan negara adalah baik.¹ Dalam perkembangannya, asumsi ini sekilas tampak akan menjerumuskan ke dalam tubir totalitarianisme,² karena terlalu mengagungkan kepentingan negara. Namun hal ini sebenarnya tidak bermaksud untuk mendominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya atau mendominasi satu kelas terhadap kelas lainnya, melainkan menghendaki suatu stabilitas secara keseluruhan. Karenanya Plato mengasumsikan bahwa lebih mudah menganalisis segala sesuatu yang lebih besar (umum) dari pada hal yang kecil (khusus).

¹ Karl R. Popper, *masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya* terj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 135.

² Totalitarianisme merupakan sistem sosio-politik ditandai campur tangan Secara dhalim oleh Negara yang bersifat otoriter dan birokratis dalam kehidupan masyarakat dan individu.

Sementara Aristoteles berlandaskan atas etika kebudayaan Yunani yaitu etika *eudaimonia*.³ Basis bangunan etika ini berasumsi bahwa *polis* ada demi kehidupan yang baik. Konsep etik tersebut mengindikasikan suatu pertautan erat antara etika, politik dan kekuasaan sebagaimana pandangan Aristoteles, bahwa sang negarawan wajib mengetahui tentang etika, karena dialah yang mengetahui dan paling memperhatikan kehidupan yang baik bagi individu dan bagi kota sebagai suatu keseluruhan. Dengan kata lain negara tidak sekedar mempunyai tugas yang lebih tinggi dari sekedar memberikan perlindungan untuk rakyatnya tapi juga negara mempunyai kewajiban moral.

Selain persoalan hubungan negara, politik dan etika, patut juga dipertanyakan: bagaimana hubungan perihal politik, kekuasaan, negara dan masyarakat? Karena bicara negara, politik, dan etika adalah persoalan dimensi manusia sebagai aktor pengelola sebuah masyarakat yang di dalamnya memuat unsur kekuasaan. Persoalan ini ditegaskan kembali oleh Aristoteles tentang kedudukan kekuasaan dan masyarakat dalam negara. Aristoteles lebih mendahulukan perihal masyarakat dari pada individu. Masyarakat dilihat sebagai suatu perkumpulan bukan merupakan suatu keseluruhan. Negara sebagai komunitas tertinggi dari perkumpulan keluarga kemudian membentuk desa dalam kehidupan yang sempurna. Dengan demikian, tujuan sebuah negara adalah

³ Aristotles, *politik* terj. Saut Pasaribu (Jogjakarta: Bentang Budaya, maret 2004), hlm. Xli.

kehidupan yang baik.⁴ Ini sejalan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, sehingga masyarakat dalam arti tertentu mendahului individu. Yang berarti individu larut dalam kolektivitas untuk menuju kebaikan bersama.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara eksklusif negara dan politik yang di dalamnya memuat unsur masyarakat dan kekuasaan berkaitan sangat erat, karena politik sendiri merupakan derivasi dari kata *polis*. Sementara, *polis* sebagaimana yang tercantum diberbagai literatur diartikan sebagai negar-kota. *Polis* merupakan istilah Yunani untuk menginterpretasikan negara. Dan kata yang berkaitan dengan *polis* adalah *polities*, yaitu seorang warga negara atau anggota *polis*, sedangkan *politea* adalah konstitusi suatu struktur organisasional.⁵ Oleh karena itu politik, negara, kekuasaan, dan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Beberapa komponen ini – politik, negara, kekuasaan, masyarakat – berjalin-temali, karena hal tersebut merupakan suatu pembahasan tentang bagaimana seharusnya menata masyarakat dan segala entitas yang mewujud yang terdapat dalam suatu negara menuju kehidupan sejahtera.

Namun, cita-cita untuk membangun suatu kehidupan bernegara yang baik atau sejahtera pernah atau selalu terlupakan dalam perkembangan zaman. Sebagaimana yang dikatakan karl R. Popper dalam bukunya “Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya”, bahwa negara-negara yang ada sekarang

⁴Aristoteles, *politik* terj. Saut Pasaribu, hlm. 126. Bandingkan dengan Bertand Russell, *sejarah filsafat Barat*, hlm. 252.

⁵ Aristoteles, *Politik* terj. Saut Pasaribu, hlm. xliii.

sebagai salinan-salinan yang mengalami pembusukan dari suatu forma atau ide yang tidak (pernah) berubah.

Negara yang bertujuan untuk kebaikan bersama yang menjadi semangat filsafat politik klasik atau dengan kata lain menjadi *common project* kebudayaan Yunani klasik terkesan utopis. Karena, secara fakta sejarah, masyarakat, kekuasaan negara maupun politik dalam implemetasinya selalu menjadi pradoks. Terkadang keputusan yang diambil oleh negara sering kali mengorbankan masyarakatnya, bahkan terjadi ketimpangan sosial, ekonomi maupun budaya serta cenderung tidak emansipatoris, sehingga memunculkan ketimpangan hak-hak kemanusiaan.

Maka dalam diskursus politik dan ilmu negara unsur kekuasaan menjadi sangat urgen untuk dipertanyakan kembali serta ditelaah lebih jauh yang berubah bentuknya menjadi kekuasaan negara. Terminologi kekuasaan negara dapat dipahami sebagai wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Di sini jelas ada keterkaitan secara konseptual antara kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan yang secara umum merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan politik. Kekuasaan negara terkait erat dengan kehidupan bersama

dalam konteks sosial. Oleh sebab itu kekuasaan merupakan bagian dari kekuasaan sosial.

Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat di dalam masyarakat. Kelainan sifat pada kekuasaan negara ini tampak dalam kuasa untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan untuk menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain. Sebagaimana pernyataan Max Weber bahwa negara memiliki kekuasaan yang luar biasa dibandingkan dengan organisasi, karena negara itu mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuasaan fisik.

Jika menilik sejenak dalam diskursus filsafat islam, Ibnu Khaldun pernah merumuskan suatu konsepsi perihal kekuasaan negara bahwa semangat kelompoklah yang menimbulkan atau memunculkan suatu negara, manusia dengan kelompoknya akan mempermudah mempertahankan hidupnya. Semangat kelompok ini menimbulkan kekuasaan negara yang mengarah pada perebutan terhadap alat-alat negara.⁶ Negara yang pada akhirnya menjadi panggung kepentingan dari berbagai kelompok, sehingga terkadang negara hanya menjadi perwakilan satu kelompok, yaitu kelompok yang memenangkan pertarungan dalam perebutan kekuasaan.

⁶ Sayyed Hossein Nasr dan Oliver Leman (ed). *Ensiklopedia Tematis Filsafat Islam* terj. Tim penerjemah mizan (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 446.

Di era kehidupan modern, paradoks tersebut terkadang luput dalam jangkauan kajian dan hanya menganggap, bahkan cenderung menerima keganjilan-keganjilan dalam ranah perpolitikan itu merupakan hal yang alamiah yang pada akhirnya mengandaikan suatu kesadaran naif melihat kenyataan politik dewasa ini. Sedangkan disisi yang lain, kecenderungan sikap lainnya yaitu, menganggap bahwa peperanganlah yang menjadi solusi dari kekejaman perpolitikan. Hal ini juga ditegaskan oleh Hannah Arendt bahwa alasan utama mengapa perang masih bersama kita bukan karena adanya kehendak untuk mati yang secara tersembunyi melekat pada manusia, atau naluri agresi yang tidak bisa direpresi, namun karena suatu fakta sederhana bahwa belum ada pengganti bagi penyelesaian akhir dalam urusan internasional yang muncul di ajang politik.⁷

Hannah Arend cukup representatif sebagai orang yang ikut merasakan kegelisahan melihat potret perpolitikan berikut segala kesenjangannya. Hannah Arendt seakan melihat politik itu secara tragis dan bahkan cenderung pesimis, karena menurutnya bukanlah sebuah emansipasi individu dari kelompok yang terjadi di dalam kekuasaan negara melainkan atomisasi,⁸ yaitu individu yang tercerabut dari komunitasnya yang merupakan dunia yang dihayati bersama. Ketercabutan individu dari identitas kolektif ini, menyeret individu tidak merasakan kebersamaan dalam kelompok.

⁷ Hannah Arendt, *Teori Kekerasan* terj. Ghafna Raiza W (Yogyakarta: LPIP, 2003), hlm. 3.

⁸ Sindhunata, "Politik Pengampungan", *Basis*, maret-april 2007, hlm. 42.

Berdasarkan pernyataan kedua tokoh tersebut – Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt – memiliki spirit kolektivitas tentang kekuasaan negara, maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas konsep kekuasaan negara Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt (untuk selanjutnya akan ditulis dengan Arendt), terutama masalah kekuasaan. Kemudian penulis akan mengkomparasikan antara kedua pemikir tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menghimpun dua rumusan masalah.

1. Bagaimana konsep kekuasaan Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep kekuasaan Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep kekuasaan antara Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt.
 - b. Untuk memahami letak perbedaan dan kesamaan tentang kekuasaan antara Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memahami dua corak pemikiran politik antara Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt.
- b. Dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbangsi bagi pemikiran filsafat politik.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang berkenaan dengan filsafat politik sudah banyak orang yang telah meneliti dan menulisnya, baik berupa artikel, buku, skripsi maupun yang lainnya. Penelitian di bidang ini, dan terdapat beberapa spesifikasi persoalan diangkat dan dibahas oleh para peneliti, juga termasuk telah banyak pandangan maupun gagasan atau perspektif. Dalam hal ini dari berbagai macam problem dan perspektif yang telah ada, penulis merasa perlu untuk mengkategorisasikan beberapa karya yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

Buku-buku yang memiliki kesinambungan dengan skripsi ini diantaranya adalah pertama, skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah dengan judul *filsafat politik dalam pandangan Al-farabi*. dalam skripsi tersebut banyak menjelaskan tentang Negara utama, asal usul negara dan tujuan negara. Skripsi ini menekankan pada sisi kepemimpinan seorang pemangku negara dalam pandangan Al-farabi. skripsi ini ditulis pada tahun 2006.

Kedua yaitu, skripsi yang ditulis oleh Moh. Su'diy dengan judul *pemikiran Muhammad Syahrul tentang konsep Negara perspektif filsafat politik*. Skripsi tersebut secara utuh menginterpretasikan pemikiran Muhammad Syahrul

yang berkaitan dengan konsep negara, relasi kepada negara dengan warga negara, relasi agama dan negara. Skripsi ini ditulis tahun 2015.

Ketiga yaitu, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Abdurrohman dengan judul *politik sebagai realisasi kebebasan (kajian atas filsafat politik Hannah Arendt dan implikasinya bagi pemikiran politik islam)*. Dalam tulisan tersebut juga banyak dijelaskan tentang negara bangsa, ruang publik dan komunikasi politik, tetapi tidak banyak menjelaskan kehendak bebas dan tindakan politik dalam pandangan Arendt.

Berdasarkan pemilahan di atas, kiranya perlu untuk melakukan penelitian atau penulisan yang mengkhususkan kajian pada pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt khususnya tentang kekuasaan dalam Negara, tindakan bebas, dan tindakan politik.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian ilmiah

yang menghasilkan data deskriptif yang berlaku bagi pengetahuan humanistik atau *interpretative* yang secara teknis, penekanannya lebih pada teks.⁹

Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama, (*primary resource*), maupun pendukung (*secondary resource*), seluruhnya adalah teks¹⁰. Dan untuk memperoleh data digunakan metode dokumentasi atau pengumpulan data.¹¹ Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data-data yang relevan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Arendt yang terkait dengan filsafat politik, yaitu “teori kekerasan”. Buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *On Violence*. Dan juga karya-karya Ibnu Khaldun terutama *Muqaddimah*, begitupun dengan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan filsafat politik atau tema yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari karya-karya atau monografi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt. Demikian juga dengan penelitian lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

⁹ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm. 12.

¹⁰ Muhammad Nazir, *metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 58

¹¹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian; suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 131.

3. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul kemudian akan diperiksa untuk dikategorisasikan atau dipilih atau berdasarkan sub-sub pokok pembahasan. Dalam proses analisis data ada beberapa metode yang akan dipakai dalam penelitian ini, baik terkait data primer maupun data sekunder.

Adapun langkah analisis data meliputi yaitu:

a. Deskriptif

Metode ini digunakan dan mengkaji gagasan data primer dalam rangka memaparkan secara umum pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt, kemudian mendalami dan menganalisis bahkan merespon pemikiran kedua tokoh tersebut.

b. Interpretasi

Dalam metode ini, penulis akan menyelami dan memahami pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt untuk mengungkap apa yang dimaksud dari pemikiran kedua tokoh yang di teliti.

c. Komparasi

Metode komparasi ini digunakan untuk membanding persamaan dan perbedaan konsep kekuasaan anatar ke dua tokoh yang di teliti. Penelitian komparasi merupakan jenis penelitian dekriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar atas permasalahan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan memperinci pokok pembahasan serta hendak menunjukkan di masing-masing babnya saling berkaitan dan runtut. Maka skripsi ini disusun sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas biografi Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt, yang terdiri dari riwayat hidup, sumber corak pemikiran dan karya-karya yang dihasilkan.

Bab III berisi tentang pemikiran Hannah Arendt dan Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan konsep kekuasaan, dalam bab ini akan diurai konsep kekuasaan dalam pemikiran ke dua tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab IV ini akan dikomparasikan pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt yang berkaitan dengan konsep kekuasaan, yang meliputi konsep masyarakat dan solidaritas. Kemudian akan menunjukkan persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Hannah Arendt.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dalam kesimpulan ini penulis akan mencoba menguraikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama, yaitu:

1. Konsep kekuasaan dalam pemikiran Arendt dan Ibnu khaldun merupakan capaian eksistensi manusia. Hubungan sosial dan tindakan manusia akan menciptakan tatanan politis untuk melindungi warganya dan merawat ruang publik. Antara Arendt dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan pentingnya kekuasaan dalam tatanan masyarakat, baik kekuasaan merupakan tujuan atau kekuasaan sebagai perangkat untuk mempertahankan eksistensi manusia. Kekuasaan bisa mengakomodir berbagai pertarungan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, kekuasaan diperlukan karena manusia tidak bisa hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya. Agar eksistensi watak sosial manusia yang agresif dan dinamis dapat terpenuhi dan bahkan dikembangkan tanpa merusak eksistensi manusia lainnya. Kekuasaan terjadi diantara manusia jika mereka bertindak bersama-sama. Kekuasaan hanya ada sebagai potensi yang dibangkitkan oleh orang-orang yang bertindak dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Telah dijelaskan dalam pembahasan asal-usul Masyarakat bahwa manusia

tidak bisa hidup secara individu dan oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah organisasi masyarakat. Setelah Organisasi masyarakat terbentuk barulah manusia menyadari bahwa pentingnya sebuah keamanan (ancaman dari pihak luar) juga sangat perlu. Mungkin serangan dari binatang bukanlah suatu ancaman yang menakutkan bagi manusia, tetapi serangan dari manusia itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagaikan bermain “topeng”. Bukan karena kekuatan fisiknya tetapi karena kelicikannya yang melebihi dari pada binatang. Oleh karena itu diperlukanlah manusia yang mempunyai otoritas yang tinggi untuk bertindak sebagai keamanan. Disamping mempunyai kekuasaan yang penuh sebagai penengah, Ia juga harus mempunyai *Authoritative Power*, karena hal inilah yang menjadi alat penting untuk menekan terjadinya konflik atau serangan dari pihak-pihak luar. Dia adalah orang yang akan melaksanakan kekuasaan dan menjauhkan manusia dari sifat agresifitas, arogansi, kedhaliman dan kebinatangan, masing-masing saling membunuh untuk memenuhi kepentingannya. Maka diperlukanlah sebuah lembaga untuk mengatur dan menertibkannya.

2. Persamaan dan perbedaan konsep kekuasaan dilihat dari dua faktor penting yakni konsep masyarakat dan solidaritas. Persamaan konsep kekuasaan pada ranah masyarakat arendt dan Ibnu Khaldun sama-sama menekankan faktor ekonomi yang melatar belakangi terbentuknya tatanan masyarakat dimana ekonomi bagi Arendt dan Ibnu Khaldun menempati posisi yang sangat penting. Persamaan pada faktor solidaritas dalam membentuk

kekuasaan, Arendt dan Ibnu Khaldun bertumpu pada satu titik, yaitu tujuan solidaritas itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan ke dua tokoh tersebut bahwa semakin kuat solidaritas maka semakin kuat pula kekuasaan. Sementara perbedaannya tetap terletak pada dua faktor tersebut: masyarakat dan solidaritas. Arendt memandang masyarakat merupakan asosiasi keluarga, sedagka Ibnu Khaldun *an sich* masyarakat terbentuk dari kumpulan-kumpulan individu-individu. Pada faktor solidaritas, Arendt menekankan pada tindakan bersama yang dalam hal ini adalah kemanusiaan sebagai tolak ukur, sedangkan Ibu Khaldun solidaritas itu terbangun dalam hubungan darah dan nasab serta agama.

B. Saran

Sejauh ini konsep kekuasaan Arendt dan Ibnu Khaldun masih sangat relevan dalam konteks Indonesia. Hal ini dapat dilihat pandangan kedua tokoh tersebut menyuarakan semangat kolektivitas. Maka dari itu menjadi penting kajian konsep kekuasaan dua tokoh tersebut untuk ditelaah lebih jauh oleh para peneliti selanjutnya, mengingat konsep kekuasaan menjadi dasar dalam bermasyarakat.

Juga para pengkaji diupayakan sekaligus mempertajam kembali dan relevansinya dengan perkembangan teoritis kekinian, karena pemikiran Arendt dan Ibnu Khaldun membuka kemungkinan-kemungkinan lain untuk diinterpretasikan dengan cara pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Mukti (ed.). *Filsafat Islam Tentag Sejarah; pilihan dari Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun dari Tunis*, terj. Charles issawi. Jakarta: Tinatamas, 1976.
- Arendt, Hannah. *Teori Kekerasan*, terj. Ghafna Raiza W. Yogyakarta: LPIP, 2003.
- *Asal-usul totalitarisme; jilid I: Antisemitisme*, terj. A. Agus Nugroho. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 1993.
- *Asal-usul totalitarisme; jilid II: Imperealisme*, terj. Alois A. Nugroho dan J.M Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- *Asal-usul totalitarisme; jilid III: Totalitarisme*, terj. J.M Soebijanta. Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 1995
- *Eichmann in Jerusalem; Reportase tentang Banalitas Kejahatan*, terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Aristoteles. *Politik*, terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000
- Baali, Fuad dan Ali Wardi. *Ibnu Khaldun dan Pola pemikiran Islam*, terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2005.

- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Budiman, Arief. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2002.
- Edkins, Jenny dan Nick Vaughan Williams (ed.). *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Baca, 2009.
- Ettinger, Elzbieta. *Selingkuh Dua Pemikir Raksasa Hannah Arendt-Martin Heidegger*, terj. P Hasudungan dan Rini Hindryati P. Jakarta: Nalar, 2005.
- Groz, Andre. *Anarki Kapitalisme*, terj. Komunitas Apiru. Yogyakarta: Resist Bool, 2005.
- Hasyim, Haidz. *Watak Peradaban dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hossein Nasr, Sayyed dan Oliver Leiman (ed.). *Ensiklopedia Tematis Filsafat Islam*, terj. Tim penerjemah mizan. Bandung: Mizan, 2003.
- J. Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Jurdi, Syafruddin. *Sosiologi Islam; Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*.

Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik; Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Mauludi, Sahrul. *Ibnu Khaldun; Perintis Kajian Ilmu Sosial Modern*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1997.

Passerin d'Enteves, Maurizio. *Filsafat Politik Hannah Arendt*, terj. M. Shafwan. Yogyakarta: Qalam, 2003.

Plato. *Republik*, terj. Sylvester G. Sukur. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Raliby, Osman. *Ibnu Chaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

R. Popper, Karl. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, terj. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sudibyo, Agus. *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012.
- Sulasma dan Dadan Rusmana. *Filsafat Sosial Budaya di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi Dengan Para Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Irsal Mas'udi
 Tempat Tanggal Lahir : Mattiro Deceng, 21 Mei 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Golongan Darah : O
 Hobi : Olah Raga
 Status : Belum Menikah
 Alamat Asal : Mattiro Deceng, Desa. Salusana, Kec. Larompong Selatan,
 Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.
 Contact Person : 085 342 006 104

PENDIDIKAN:

1. SDN 01 Salusana (lulus tahun 2005)
2. MTsN 1 PA, As'adiyah (lulus tahun 2008)
3. MA Nurul As'adiyah Callaccu (lulus tahun 2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Filsafat Agama tahun 2011

ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI

1. Pendiri dan anggota Lembaga Studi Filsafat (LSFil) Yogyakarta
2. Koordinator Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) LPM Arena 2013-2014 dan 2014-2015
3. Koordinator devisi pendidikan KMPD 2013-2014
4. Koordinator devisi pendidikan FPPI 2014-2015